

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Implementasi program bantuan sosial di masa pandemi ini dapat dilihat dengan ilmu antropologi pembangunan yang berkaitan dengan fenomena ekonomi dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pembangunan merupakan eksistensi dari sejumlah tindakan manusia, sementara kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. (Koentjaraningrat dalam Agus & Sukidin, 2003, hal. 4–5) pada buku yang berjudul Pengantar Ilmu Budaya, mengemukakan bahwa hampir semua tindakan manusia adalah bagian dari kebudayaan. Khususnya dalam pembangunan, yang melibatkan masyarakat menjadi pelaku sekaligus objek dari berbagai aktivitas pembangunan.

(Geertz dalam Noor, 2013, hal. 3) menilai bahwa birokrasi pemerintahan sebagai sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal memiliki peran yang penting dalam proses modernisasi pada saat ini. Selain itu, Geertz juga mendasari kebudayaan sebagai *pattern for behaviour* dan sebagai *pattern of behaviour*. Sebagai pola bagi tindakan, kebudayaan diposisikan sebagai seperangkat aturan dan pedoman yang dijadikan sebagai bentuk interpretasi dari tindakan. Sedangkan sebagai pola dari tindakan, kebudayaan adalah apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai suatu tindakan. Khususnya di sini dapat dilihat bahwa kebijakan sebagai *pattern for behaviour* dan program sebagai *pattern of behaviour*. Implementasi pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilihat dari suatu kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dengan implementasi program di lapangan. Sebagai *pattern for* yang memandu melalui adanya pedoman dalam pelaksanaan program BPNT belum tentu selaras dengan tata kelakuan di lapangan. Setiap orang akan dihadapkan pada realitas nyata yang terjadi di lapangan, sehingga *pattern for* sebagai suatu pedoman belum tentu dapat diikuti.

Kebijakan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengatur masyarakat dari atas ke bawah dengan cara memberikan sebuah *rewards* dan *sanctions*. Secara intrinsik dapat dilihat bahwa kebijakan adalah sebuah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kebijakan dapat dilihat sebagai sebuah cetak biru yang akan mengarahkan dan mempengaruhi

perilaku masyarakat yang terkena dampak kebijakan tersebut (Marzali, 2005, hal. 131–135). Kebijakan disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk membuat perilaku masyarakat menjadi sesuai dengan tujuan dari rumusan kebijakan tersebut. Dapat dilihat bahwa kebijakan juga merupakan suatu produk kultural. Sementara, perancangan dan implementasi dari suatu kebijakan dapat dilihat sebagai suatu proses kultural, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (*planned sociocultural change*). Secara substansial juga kebijakan merupakan subjek kajian yang sangat kompleks, dinamis dan tidak statis. Kajian kebijakan dalam bidang kehidupan masyarakat sangat luas, khususnya dengan adanya upaya dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan sosial dengan kembali menerbitkan penguatan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di masa pandemi ini.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang tidak mudah untuk diselesaikan dan kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks sifatnya. Program yang melindungi kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap faktor internal yang misalnya berasal dari status individu, kepala keluarga yang meninggal, jatuh sakit. Faktor eksternal juga mempengaruhi, misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam seperti pandemi Covid-19 ini, ataupun sebuah konflik sosial (Prawoto, 2009, hal. 66).

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah mengupayakan berbagai program pembangunan di masa pandemi ini, khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai yang kembali digencarkan pada masa pandemi ini yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG*) Nomor 2 tentang pencegahan kelaparan. BPNT merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai atau *cashless* dengan menggunakan kartu elektronik sebagai media penarikan bantuan yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan hanya untuk membeli bahan pangan seperti beras atau telur di e-Warung. Pada tahun 2020 untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan juga meningkatkan efektivitas dari program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan lebih lanjut. Dengan naiknya nominal bantuan yang awalnya Rp. 150.000 per KPM untuk tiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000 per KPM untuk tiap bulannya. Tidak hanya nominal yang dinaikkan, tetapi program tersebut juga memperluas jenis komoditas

yang dapat dibeli, sehingga tidak hanya komoditas seperti beras dan telur saja yang disediakan (Kemensos, 2020, hal. 2–3).

Dalam pelaksanaannya juga terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan program tersebut, pendamping terdiri dari sumber daya manusia yang telah memperoleh bimbingan atau pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya peran pendamping yang turut menyukseskan program tersebut maka dapat menjembatani hubungan antara penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang ikut terlibat pada tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten atau kota (Sabarisman, 2019, hal. 147).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program bantuan sosial dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan tiga (2) permasalahan inti yang muncul sehingga bantuan sosial yang diperuntukkan untuk warga miskin terbilang masih belum tepat sasaran. Permasalahan pertama jika dilihat dari kasus yang sering terjadi adalah data penerima bantuan sosial yang tidak akurat atau tidak tepat sasaran. Ketidakakuratan data yang diterima tentunya menjadi faktor krusial yang dapat menyebabkan terjadinya pelaksanaan pemberian BPNT yang tidak tepat sasaran. Ada dua (2) faktor yang menyebabkan adanya ketidakakuratan data penerima PKH yaitu disebabkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri pada proses verifikasi dan validasi yang masih lemah dan lambat.

Sementara juga kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara tidak langsung telah memunculkan kelompok masyarakat rentan baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam basis data penerima bantuan sosial. Kedua, dilansir dari portal berita CNN Indonesia.com pada tanggal 23 Juli 2021 yang berisi bahwa Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang mengaku masih menerima banyaknya laporan terkait pemotongan bantuan sosial, tidak jarang juga terdengar beberapa kasus tentang adanya oknum tertentu yang mejaring bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan pada keluarga miskin, hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka. Jumlah dana bantuan sosial yang semakin besar juga menjadi pemicu terjadinya hal tersebut, sementara juga dengan sistem penyaluran bantuan sosial yang terbilang masih belum transparan dan akuntabel.

Permasalahan kedua, pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial yang nyatanya masih lemah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masih menemukan sejumlah masalah yang ada dalam penyaluran belanja bantuan sosial pemerintah pada tahun 2020, seperti halnya identitas kependudukan penerima bantuan sosial yang tidak valid (Wahyuni, 2021, hal. 14–15).

Maka daripada itu, dengan dilakukannya penelitian ini khususnya di masa pandemi Covid-19 tentang program Bantuan Pangan Non Tunai yang kembali diimplementasikan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan akibat dampak dari Covid-19, penelitian ini didasarkan atas tiga (3) alasan pemilihan judul yang rasional, empiris dan aktual, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. 1. 1. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian ini penting dilakukan atas dasar 3 (tiga) alasan, yakni dengan pemilihan judul yang rasional, empiris, dan aktual. Alasan pertama, secara empiris dengan mengacu pada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam pengertian empiris yaitu merupakan suatu alasan yang didasarkan atas pengetahuan, seperti hasil dari pengamatan atau observasi, yang disertai juga dengan hasil yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan (<https://kbbi.web.id/>, 2022).

Khususnya di sini program Bantuan Pangan Non Tunai yang kembali digencarkan pada masa pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penanggulangan dampak kemiskinan akibat dari pandemi Covid-19. Ada dua (2) alasan empiris yang mendukung bahwa penelitian tentang program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan, antara lain:

Alasan empiris yang pertama (1) Program Bantuan Pangan Non Tunai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG*) Nomor 2 tentang pencegahan kelaparan dengan harapan dapat membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada tahun 2030 menjadi tulang punggung dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan berasal dari berbagai sisi. Di dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi,

oleh karena itu kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan juga menyangkut dua (2) hal seperti: i) kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin; ii) menyangkut ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Bappenas, 2022).

Alasan empiris yang kedua (2) Bantuan Pangan Non Tunai yang seharusnya menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan akibat dari dampak Covid-19 dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan banyak kasus di mana bantuan yang seharusnya diperuntukkan untuk warga miskin terbilang masih belum tepat sasaran.

Alasan empiris yang ketiga (3) Dilansir dari portal berita inews.id bahwa pandemi Covid-19 yang melanda selama dua tahun lebih berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin dan memunculkan kelompok masyarakat rentan baru yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2019, tentunya akibat dampak dari masa pandemi ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) telah menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat rentan baru. Bantuan yang ditujukan bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan kelas ekonomi bawah tetapi juga bagi masyarakat kelas menengah yang terdampak pandemi Covid-19.

Alasan penelitian yang kedua, secara rasional dengan mengacu pada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam pengertian rasional yaitu merupakan suatu alasan yang didasarkan atas hal-hal yang logis dalam artian sejalan dengan pikiran dan pertimbangan yang logis menurut akal pikiran yang sehat yang didukung juga dengan adanya fakta yang terbukti kebenarannya (<https://kbbi.web.id/>, 2022). Khususnya di sini program Bantuan Pangan Non Tunai yang dirancang dengan tujuan, manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Ada satu (1) alasan rasional yang mendukung bahwa penelitian tentang Program Bantuan Langsung Tunai sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan, antara lain alasan rasional yang pertama (1) Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai dengan tujuan dan manfaat jangka pendek yakni: i) dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan; ii) dapat memberikan gizi yang seimbang kepada KPM; iii) meningkatkan

ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, dan kualitas, serta administrasi; iv) memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kedua (2) dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai dengan tujuan dan manfaat jangka panjang yakni: i) meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM dan juga sebagai mekanisme perlindungan (*social security*); ii) meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; iii) meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; dan iv) meningkatnya gerakan transaksi non tunai yang sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) (Belanawane S., 2020, hal. iv).

Alasan penelitian yang ketiga, secara aktual dengan mengacu pada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam pengertian aktual yaitu merupakan suatu alasan yang didasarkan atas peristiwa yang sedang benar-benar ada dan terjadi, serta menjadi sebuah pembicaraan hangat di kalangan masyarakat luas (<https://kbbi.web.id/>, 2022).

Khususnya di sini program Bantuan Pangan Non Tunai yang kembali digencarkan pada masa pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penanggulangan dampak kemiskinan akibat dari pandemi Covid-19. Ada satu (1) alasan aktual yang mendukung bahwa penelitian tentang program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaannya di lingkup Kota Bekasi masih sering ditemukan beberapa kasus ketidaktepatan sasaran, antara lain 1) Dilansir dari portal berita Kompas.com pada tanggal 22 April 2020 yang berisi tanggapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang menanggapi bahwa banyaknya bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi dianggap masih terjadi kasus ketidaktepatan sasaran pada bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19. Rahmad Effendi selaku Wali Kota Bekasi, mengatakan bahwa bantuan yang tidak sesuai dengan sasaran akan segera dilaksanakan evaluasi dari pihak RT dan RW, sebab pihak RT dan RW memiliki tugas untuk mendata warganya yang terdampak Covid-19. Pemerintah juga mengharapkan inisiatif dari masyarakat jika ada bantuan yang salah sasaran untuk dapat mengembalikan bantuan sosial yang telah didapat, jika memang merasa mampu dan tidak terdampak Covid-19 (Lova, 2020, hal. 1). Tri Adhianto

selaku Wakil Wali Kota Bekasi dalam portal berita Okenews.com pada tanggal 25 Juli 2021 menanggapi laporan tentang penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran dengan menyatakan pemerintah telah memberikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah diperbarui kepada Kementerian Sosial secara langsung. Tri Adhianto menjelaskan bahwa laporan kasus tidak tepat sasaran itu muncul setelah pemerintah menanggapi aduan dari ketua RW yang menilai bantuan sosial tunai tidak tepat sasaran dikarenakan masih menggunakan DTKS yang lama (Suryajana, 2021, hal. 1).

1. 1. 2. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan pada tema yang mengangkat tentang permasalahan kemiskinan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai objeknya. Telah terlebih dahulu diteliti dalam berbagai penelitian terdahulu yang melihat bagaimana implementasi dari penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai. Dari 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang telah ditelusuri yaitu :

Pertama, yakni penelitian yang ditulis oleh (Sari, 2021) seorang Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, program tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam proses penyalurannya program BLT telah berjalan dengan cukup baik, namun jika dilihat kembali pada implementasinya masih dinilai belum berjalan dengan baik. Teori yang dipakai dalam ini adalah Teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain; 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) karakter, 4) struktur birokrasi.

Kedua, yakni penelitian yang ditulis oleh (Thalia, 2020) Winnie Thalia seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin. Berdasarkan analisa data yang

dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil survei dan analisis penelitian efektivitas kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai ini sudah berjalan dengan cukup efektif jika dilihat dari pemahaman yang mengatakan pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik, tetapi disisi lain masih ada yang perlu diperbaiki seperti ketepatan sasaran penerima program BPNT yang masih belum tepat sasaran. Hal tersebut ditunjukkan dari masih terdapatnya dupllikasi data yang terdaftar dalam data penerima BPNT seperti survei yang dilakukan oleh pengurus desa secara maksimal sehingga dapat mendapatkan KPM yang sesuai dengan kriteria syarat yang ditentukan, pengurusan dan pengambilan BPNT terbilang tidak rumit dan adanya sosialisasi untuk masyarakat walaupun belum tersampaikan secara merata. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori efektivitas pelaksanaan program yang dikemukakan oleh Sutrisno, bahwa dalam pelaksanaannya harus meliputi 1) pemahaman atas program yang dilaksanakan, 2) pelaksanaan yang tepat sasaran, 3) pelaksanaan yang tepat waktu, 4) tercapainya sebuah tujuan dan menciptakan perubahan yang nyata.

Ketiga, yakni penelitian yang ditulis oleh (Adriana, 2020) seorang Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Sariah, Universitas IAIN Bone. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Jalin, Kecamatan Awangpone cukup mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dapat diihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) yang dikemukakan oleh Kranenburg, bahwa konsep *Welfare State* bukan hanya memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.

Keempat, yakni penelitian yang ditulis oleh (Imal Alimah Akmal, 2020) seorang Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 1) tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena masih terdapat masalah pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sehingga dapat menghambat proses penyaluran bantuan, 2) terdapat karakteristik agen pelaksana yang bersikap tidak ramah dan tidak melaksanakan aturan yang ada sehingga tidak mencerminkan sikap pelayanan publik yang baik. Teori yang dipakai dalam

penelitian ini adalah Teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, antara lain; 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) karakter, 4) struktur birokrasi.

Kelima, yakni penelitian yang ditulis oleh (Sajian, 2020) seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhamadiyah Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST di Kota Mataram bisa dibilang sudah berjalan cukup efektif. Secara prosedural juga telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun memang secara nominal dana bantuan tersebut tidak sepenuhnya dapat membendung kebutuhan dalam kurun waktu satu bulan. Dari aspek lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dalam implementasi program BST masih ditemukan kasus data penerima yang ganda. Hal tersebut tentunya menjadikan implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi mengalami ketidaktepatan sasaran. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang menggunakan model pendekatan Van Meter dan Van Horn yang di dalamnya terdapat enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain: 1) standar dan sasaran kebijakan; 2) sumber daya; 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4) karakteristik agen pelaksana; dan 4) lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Keenam, yakni penelitian yang ditulis oleh (Burhanuddin, 2021) seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhamadiyah Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dari kelompok sasaran yang dituju. Kemudian juga dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasikan fungsinya dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Tetapi apa yang menjadi sebuah permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang menggunakan model pendekatan George C. Edwards III yang di dalamnya terdapat

empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi.

Ketujuh, yakni penelitian yang ditulis oleh (Violleta, 2022) seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Administrasi Negara, Universitas HKBP Nommensen Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi efektivitas Program Bantuan Sosial dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin di Desa Kuta Jurung sudah berjalan cukup baik. Khususnya dalam pendistribusian bantuan sosial juga sudah tepat sasaran dimana yang mendapatkan bantuan sosial memang sudah benar-benar memenuhi kriteria masyarakat yang miskin serta masyarakat yang terdampak Covid-19 yang sulit memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Bantuan sosial yang diberikan berupa kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, gula, dan sembako yang lainnya yang juga berguna untuk kebutuhan pangan pokok. Dalam penyediaannya juga sudah berjalan dengan baik karena masyarakat sudah merasa senang dengan adanya bantuan seperti ini sehingga dapat mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Disarankan efektivitas program bantuan sosial ini dapat terus terlaksana dengan baik sehingga pada pembagian bantuan sosial selanjutnya lebih terarah serta akan lebih baik bantuan sosial yang diberikan berupa uang tunai saja, karena untuk mencegah terjadinya penyalgunaan dana anggaran dan untuk lebih mengefektifkan pendistribusian bantuan sosial tersebut. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno yang dapat diukur dari empat tingkat yaitu: 1) pemahaman program; 2) tepat waktu; 3) tepat sasaran; 4) pencapaian tujuan.

Kedelapan, yakni penelitian yang ditulis oleh (Syahrini, 2021) seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hassanaudin Makassar. Khususnya dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa penentuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Takalar ternyata belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan adanya data KPN yang gagal tersalurkan dengan kelima (5) faktor diantaranya seperti tumpang tindih data penerima bansos, KPM yang telah meninggal, KPM dengan data ganda, NIK tidak valid, dan KPM yang telah pindah domisili. Sedangkan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Takalar yang disalurkan oleh PT POS Indonesia secara

langsung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang menggunakan model pendekatan Van Meter dan Van Horn yang di dalamnya terdapat enam variabel antara lain : 1) standar dan tujuan (*standards and objectives*); 2) sumber daya (keuangan/*resources*); 3) karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*); 4) komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*); 5) sikap para pelaksana (*disposition of implementors*) dan; 6) kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social, and political conditions*).

Kesembilan, yakni penelitian yang ditulis oleh (Krisma, 2021) seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jursan Program Studi Administrasi Negara, Universitas HKBP Nommesen Medan. Desa Bunturaja sebagai desa yang berada di pusat kecamatan memiliki banyak keuntungan dalam melaksanakan program bantuan sosial ini. Selain dari segi jarak yang ditempuh, pusat keberadaan kantor-kantor penting di wilayah Desa Bunturaja memang sangat mendukung pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 seperti Kantor Kecamatan dan Kantor POS. Selain itu juga, dari segi sarana yang dimiliki Kantor Desa Bunturaja dapat mendukung pelaksanaan program bantuan seperti dengan adanya kantor atau balai desa yang memadai. Sedangkan di Desa Soban, masyarakat harus mengambil jarak yang cukup jauh untuk sampai di pusat kecamatan, dan dengan kondisi jalan yang cukup rusak. Selain itu juga ada dari masyarakat penerima bantuan terbilang belum memiliki kendaraan pribadi sehingga mereka kesusahan untuk mencari tumpangan. Maka daripada itu perlu adanya kebijakan baik itu dari pihak kecamatan atau pun pemerintah desa agar dapat membagi waktu penerimaan bantuan dari setiap desa, sehingga untuk Desa Soban sendiri yang berada jauh dari pusat kecamatan tidak lagi mengalami kesulitan dengan antrean yang panjang dan dapat juga untuk mencegah terjadinya kerumunan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang menggunakan model pendekatan Edwards III yang di dalamnya terdapat 4 variabel antara lain: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; 4) struktur birokrasi.

Terakhir, yakni penelitian yang ditulis oleh (Nur, 2021) seorang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Sosiologi, Universitas Hassanudin Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan

bahwa implementasi BST di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dapat dilihat berjalan dengan kurang baik, khususnya dapat dilihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui tentang prosedur syarat dan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan BST tersebut. Serta verifikasi data yang tidak dilakukan kembali karena menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini, berdampak pada banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BST karena tidak dilakukan verifikasi data kembali. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kemiskinan Robert Chambers, dimana dalam pemikiran Robert Chambers tentang *deprivatio of trap* atau perangkap kemiskinan meliputi 5 dimensi antara lain: 1) ketidakberdayaan; 2) kerentanan; 3) kelemahan fisik; 4) isolasi; dan 5) kemiskinan itu sendiri.

Dari 10 (sepuluh) penelitian terdahulu dari latar belakang program studi yang berbeda-beda dan dengan perspektif yang berbeda-beda juga, maka dapat diketahui melalui tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sepuluh (10) Judul Studi Tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2020-2022

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Penerbit	Judul Penelitian	Perspektif Teori atau Konsep yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	(Sari, 2021). Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.	<i>Implementasi Permendesa PDPT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi)</i>	Teori Implementasi (Model George C. Edwards III).	Dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa pada penyaluran program BLT telah berjalan dengan cukup baik namun dalam implementasinya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Khususnya jika dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD “Kalau dari proses penyaluran sudah sesuai dengan prosedurnya, tetapi kalau dari implementasi yang saya lihat sekitar 70% tepat sasaran dan selebihnya masih belum tepat karena masih ada orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut
2.	(Thalia, 2020). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas	<i>Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.</i>	Teori Efektivitas (Sutrisno).	Dalam hasil penelitian ini, khususnya berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil survei dan analisis penelitian efektivitas kebijakan program bantuan langsung tunai sudah berjalan dengan cukup efektif. Tetapi di sisi lain masih ditemukan adanya duplikasi

	Hasanuddin.			data yang terdaftar dalam data penerima BPNT. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut dijalankan yaitu seperti survei yang dilakukan oleh pengurus desa secara maksimal sehingga dapat mendapatkan KPM yang sesuai dengan kriteria syarat yang ditentukan, pengurus dan pengambilan BPNT terbilang tidak runtuh dan adanya sosialisasi untuk masyarakat walaupun belum tersampaikan secara merata
3.	(Adriana, 2020).	<i>Analisis Penyaluran Bantuan</i>	Teori Negara	Dari hasil penelitian ini, khususnya j

	Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas IAIN Bone.	<i>Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Desa Jailing Kec. Awangpone Kab, Bone).</i>	Kesejahteraan /Welfare State Theory (Kranenburg).	dilihat pada fenomena yang terjadi di D Jalin, Kecamatan Awangpone bahwa banyak terjadi masalah yang disampaikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, diantaranya adalah: i) bahwa prosedur penerimaan BPNT belum terpenuhi secara keseluruhan; ii) untuk pendataan seharusnya dilakukan secara langsung dan transparan; iii) untuk persyaratan administrasi mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) seharusnya tidak hanya terbatas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), melainkan beberapa persyaratan administrasi lainnya yang lebih menunjang.
4.	(Imal Alimah Akmal, 2020). Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan,	<i>Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di</i>	Teori Implementasi (Model George C. Edwards III).	Dari hasil penelitian ini, khususnya jika dilihat bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Palangga sudah berjalan dengan cukup baik. Tetapi masih terdapat faktor penghambat

	Universitas Muhammadiyah Makassar.	<i>Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.</i>		diantaranya seperti fasilitas mesin EDC yang sering mengalami <i>error</i> dan belum masuk saldo pada rekening dari beberapa KPM. Juga ditemukan bahwa adanya beberapa pendamping yang melang menyalahgunakan tugas dan fungsinya dalam mendampingi masyarakat pada saat penyaluran bantuan sehingga tidak mencerminkan sifat pelayanan publik yang baik.
5.	(Sajian, 2020). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram.	<i>Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020.</i>	Teori Implementasi (Model Van Meter dan Van Horn).	Dari hasil penelitian ini, khususnya jika dilihat pada Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST di Kota Mataram bisa dibilang sudah berjalan cukup efektif. Secara prosedural juga telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun memang secara nominal dan bantuan tersebut tidak sepenuhnya dapat membendung kebutuhan dalam kurun waktu satu bulan. Dari aspek lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dalam implementasi program BST masih ditemukan kasus di penerima yang ganda. Hal tersebut tentu menjadikan implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi mengalamai ketidaktepatan sasaran.
6.	(Burhanuddin, 2021).	<i>Implementasi Program Bantuan</i>	Teori	Dari hasil penelitian ini, khususnya

	Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhamadiyah Mataram.	<i>Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.</i>	Implementasi (Model George C. Edwards III).	menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat miskin di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dari kelompok sasaran yang dituju. Kemudian juga dimana kelembagaan yang berkoordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasikan fungsinya dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Tetapi apa yang menjadi sebab permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa.
7.	(Violleta, 2022). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Administrasi Negara,	<i>Implementasi Efektivitas Program Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Penyediaan Kebutuhan Pokok (Pangan) Rumah Tangga Miskin Tahun 2020 (Studi Kasus: Desa Kuta</i>	Teori Efektivitas (Sutrisno).	Dari hasil penelitian ini, khususnya bahwa implementasi efektivitas Program Bantuan Sosial dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin di Desa Kuta Jurung sudah berjalan cukup baik. Khususnya dalam pendistribusian bantuan sosial ju

	Universitas HKBP Nommensen Medan.	<i>Jurung Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang).</i>		sudah tepat sasaran dimana ya mendapatkan bantuan sosial memang sudah benar-benar memenuhi kriteria masyarakat yang miskin serta masyarakat yang terdampak Covid-19 yang sulit memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Bantuan sosial yang diberikan berupa kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, gula, dan sembako yang lainnya yang juga berguna untuk kebutuhan pangan pokok. Dalam penyediaannya juga sudah berjalan dengan baik karena masyarakat sudah merasa senang dengan adanya bantuan seperti ini sehingga dapat mengurangi beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Disarankan efektivitas program bantuan sosial ini dapat terus terlaksana dengan baik sehingga pada pembagian bantuan sosial selanjutnya lebih terarah serta akan lebih baik bantuan sosial yang diberikan berupa uang tunai saja, karena untuk mencegah terjadinya penyalgunaan dana anggaran dan untuk lebih mengefektifkan pendistribusian bantuan sosial tersebut
8.	(Syahrini, 2021). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hassanaudin	<i>Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Oleh Kementerian Sosial RI Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Takalar.</i>	Teori Implementasi (Model Van Meter dan Van Horn)	Dari hasil penelitian ini, khususnya jika dilihat pada penentuan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) Kabupaten Takalar ternyata belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan adanya data KPN yang gagal tersalurkan dengan kelima (5) faktor diantaranya seperti tumpang tindih dan

	Makassar.			penerima bansos, KPM yang telah meninggal, KPM dengan data ganda, NIK tidak valid, dan KPM yang telah pindah domisili. Sedangkan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Takalar yang disalurkan oleh PT POS Indonesia secara langsung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
9.	(Krisma, 2021). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Program Studi Administrasi Negara, Universitas HKBP Nommesen Medan.	<i>Implementasi Program Bantuan Sosial Covid-19 di Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi.</i>	Teori Implementasi (Model George C. Edwards III).	Dari hasil penelitian ini, khususnya jika dilihat bahwa Desa Bunturaja sebagai desa yang berada di pusat kecamatan memiliki banyak keuntungan dalam melaksanakan program bantuan sosial ini. Selain dari segi jarak yang ditempuh, pusat keberadaan kantor-kantor penting di wilayah Desa Bunturaja memang sangat mendukung pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19 seperti Kantor Kecamatan dan Kantor Kecamatan. Selain itu juga, dari segi sarana yang dimiliki Kantor Desa Bunturaja dapat mendukung pelaksanaan program bantuan seperti dengan adanya kantor atau balai desa yang memadai. Sedangkan di Desa Soban, masyarakat harus mengambil jarak yang cukup jauh untuk sampai di pusat kecamatan, dan dengan kondisi jalan yang cukup. Selain itu juga beberapa dari masyarakat penerima bantuan terbilang belum memiliki kendaraan pribadi sehingga mereka kesusahan untuk menjangkau tumpangan. Maka daripada itu perlu adanya

				kebijakan baik itu dari pihak kecamatan maupun pemerintah desa agar dapat membantu waktu penerimaan bantuan dari setiap desa sehingga untuk Desa Soban sendiri yang berada jauh dari pusat kecamatan tidak mengalami kesulitan dengan antrean yang panjang dan dapat juga untuk mencegah terjadinya kerumunan.
10.	(Nur, 2021). Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Program Studi Sosiologi, Universitas Hassanudin Makassar.	<i>Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Kelompok Miskin Terdampak Covid-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)</i>	Teori Kemiskinan/ <i>Deprivation of Trap</i> (Robert Chambers)	Dari hasil penelitian ini, khususnya jika dilihat bahwa implementasi BST di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang dapat dilihat berjalan dengan kurang baik, khususnya dapat dilihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui tentang prosedur syarat dan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan BST tersebut. Selain verifikasi data yang tidak dilakukan kembali karena menggunakan data DTKS dari Kementerian Sosial dan data yang digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang ini, berdampak pada banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan BST karena tidak dilakukan verifikasi data kembali.

Sumber : Analisis Peneliti (2022)

1. 2. Rumusan Masalah

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai atau *cashless* dengan menggunakan kartu elektronik sebagai media penarikan bantuan yang diberikan langsung kepada KPM. Namun, dalam pelaksanaannya BPNT sebagai program bantuan sosial masih seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul, sehingga bantuan sosial yang diperuntukkan untuk warga miskin terbilang masih belum tepat sasaran.

Permasalahan tersebut yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya ketepatan dalam implementasi sebuah program. Sehingga hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keempat (4) faktor yang mendorong implementasi program yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) watak/sikap; dan 4) struktur birokrasi.

Dapat dilihat pada tabel 1.1. Studi Terdahulu, penelitian ini berdasarkan pada 10 (sepuluh), yakni penelitian yang dilakukan oleh (Thalia, 2020) dan (Violleta, 2022) yang menggunakan teori/perspektif Edy Sutrisno mengenai keefektivitasan sebuah program. (Sajian, 2020) dan (Syahrini, 2021) yang menggunakan teori/perspektif Van Meter mengenai implementasi sebuah program yang dipengaruhi oleh komunikasi antar organisasi. (Adriana, 2020) yang menggunakan teori/perspektif Kranenburg mengenai konsep *Welfare State*. Serta (Nur, 2021) yang menggunakan teori/perspektif Robert Chambers yang melihat fenomena kemiskinan dalam konsep *Deprivation of Trap*.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021), (Imal Alimah Akmal, 2020), (Burhanuddin, 2021), dan (Krisma, 2021) terkait dengan menggunakan teori/perspektif yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Adapun perbedaan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian (Sari, 2021), (Imal Alimah Akmal, 2020), (Burhanuddin, 2021), dan (Krisma, 2021) adalah terkait dengan sudut pandang ilmu antropologi pembangunan, yang melibatkan masyarakat menjadi pelaku sekaligus objek dari berbagai aktivitas pembangunan.

Peneliti menggunakan perspektif ilmu antropologi, dikarenakan berdasarkan pada studi terdahulu yang hanya melihat menggunakan perspektif ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan, penelitian ini juga memiliki lokasi penelitian yang berbeda yaitu dengan bertempat di Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi. Teori George C. Edwards III yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang paling sesuai untuk mengukur sebuah keberhasilan sebuah pelaksanaan program yang mana tidak hanya melihat dari sisi sistem birokrasi (pemerintah) yang hadir sebagai faktor pendukung kebijakan, tetapi juga dari

sisi lain seperti faktor komunikasi, faktor peran sumber daya, dan pada sikap dari pelaksana maupun pendukung kebijakan (masyarakat).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian yang disusun berkaitan dengan poin sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi di Kampung Sawah?
2. Bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam upaya penanggulangan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kampung Sawah?
3. Bagaimana keempat (4) aspek (komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi) dapat mempengaruhi implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kampung Sawah?

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang implementasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, khususnya pada masa pandemi, dengan poin sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi di Kampung Sawah.
2. Untuk menjelaskan implementasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam upaya penanggulangan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kampung Sawah.
3. Untuk menjelaskan keempat (4) aspek (komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi) dapat mempengaruhi implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kampung Sawah.

1. 4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. 4. 1. Manfaat Teoritis

Dalam pengembangannya, penelitian ini bisa berkontribusi dan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam perkembangan kajian-kajian kemiskinan, khususnya pada Ilmu Antropologi Pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran dengan studi kasus secara nyata dengan mengkaji menggunakan teori implementasi model George C. Edwards III.

1. 4 . 2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat secara :

1. Bagi masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat BPNT diharapkan penelitian ini menjadi sebuah informasi mengenai implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai yang dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan. .
2. Bagi pelaksana program, khususnya petugas TKSK, petugas pendamping PKH, PSM di Kelurahan Jatimurni sebagai sebuah kritik membangun serta masukan dalam melaksanakan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang ada.
3. Bagi pemerintah, khususnya Kemensos, Dinsos Kota Bekasi, Bank penyalur, sebagai sumber informasi mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Jatimurni.

1. 5. Kerangka Konsep dan Teori

Sebuah program pembangunan tidak pernah terlepas dari peran pemerintah sebagai sebuah lembaga resmi yang secara langsung mendukung jalannya program pembangunan, tetapi disamping itu harus dilihat peran masyarakat yang penting sebagai objek pembangunan itu sendiri. Terlebih lagi peran masyarakat secara lebih lanjut lagi, khususnya dengan terlibat langsung dalam rangkaian program pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, dan turut ikut serta juga dalam diadakannya implementasi program-program pembangunan yang telah berlangsung.

Peneliti tertarik untuk melihat pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan menggunakan teori implementasi model George C. Edwards III. Peneliti juga akan menjelaskan mengenai perjalanan hidup atau biografi dari pencetus teori, pengaruh pemikiran dan siapa saja yang dipengaruhi, serta karya-karya yang dihasilkan oleh pencetus teori, dan terakhir penjelasan lebih lengkap mengenai inti teori yang dihasilkan dalam teori implementasi kebijakan.

1. 5. 1. Teori Implementasi George C. Edwards III

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Edward, 1980, hal. 1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baik dan tepatnya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan dari

terelasisasikannya kebijakan publik tidak akan dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya, seberapa banyak, baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan yang dilakukan, jika kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut tidak akan dapat tercapai.

Oleh karena itu untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasinya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan sebaik mungkin. Dalam implementasi model Edwards menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) watak atau sikap; dan 4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkesinambungan dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

1. 5. 2. Keenam Indikator Ketepatan Kemensos

Untuk mendukung mengetahui keberhasilan dari implementasi sebuah program, Kemensos menetapkan 6T menjadi indikator utama dalam keberhasilan sebuah program. Khususnya pada tanggal 7 April 2019 yang berisi bahwa Kemensos menjadikan 6T sebagai indikator keberhasilan dari penyaluran bantuan sosial. Keberhasilan dari implementasi program bantuan sosial dapat dilihat dari keenam (6) indikator yaitu: 1) ketepatan sasaran; 2) ketepatan jumlah; 3) ketepatan waktu; 4) ketepatan harga; 5) ketepatan kualitas; dan 6) ketepatan administrasi. Keenam indikator tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan suatu program.

1. 5. 1. 1. Sejarah dan Kehidupan George C. Edwards III

George Charles Edwards III George lahir di Rochester, New York, pada tahun 1947 dan pindah ke Florida bersama keluarganya pada tahun 1959. George C. Edwards III merupakan seorang Professor Ilmu Politik dan sebagai *Jordan Chair* dalam *Presidential Studies Emiritus* di Texas Universitas A&M. George C. Edwards III dikenal sebagai seorang sarjana terkemuka dalam studi politik, khususnya di Amerika.

Edwards pernah menjabat sebagai *Winant Professor of American Government* di Universitas Oxford, *John Adams* di Universitas London, dan sebagai senior yang mengunjungi *Science Po-Paris*, Universitas Peking, Universitas Hebrew Yerusalem, dan Akademi Militer AS di West Point. Ia juga merupakan Anggota Asosiasi Universitas Nuffield, Oxford, dan juga sebagai anggota pendiri dan dari tahun 1991-2001, sebagai direktur, Pusat Studi Kepresidenan.

Professor Edwards telah menjabat sebagai Presiden Bagian dalam Penelitian Kepresidenan dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika, yang telah memberikan penghargaan sebagai rasa dan tanda hormat, serta menghadiahkan *Career Service Award*. Sebagai anggota *Phi Beta Kappa* dan Anggota *Woodrow Wilson*, ia juga menerima Dekorasi untuk Layanan Sipil Terhormat dari Angkatan Darat AS dan penghargaan *Phi Sigma Alpha* dari Asosiasi Ilmu Politik Selatan.

Edwards juga merupakan anggota Dewan Hubungan Luar Negeri, ia telah menjadi pembicara di lebih dari 300 universitas dan kelompok lain di dalam AS maupun di luar negeri, ia telah menjadi pembicara di banyak konferensi nasional dan internasional, melakukan beberapa ribu wawancara dengan pers nasional dan internasional. *National Science Foundation*, *Smith-Richardson Foundation*, dan *Ford Foundation* telah berkontribusi untuk mendanai karya-karya yang dihasilkan oleh George C. Edwards III. (A&M, n.d.)

1. 5. 1. 2. Karya-Karya George C. Edwards III

Edwards telah menulis dan menyunting sebanyak 27 buku tentang politik Amerika dan pembuatan kebijakan publik, serta merupakan seorang editor dari Studi Kepresidenan dan seorang editor dari series *Oxford Handbook of American Politics* (*Oxford University Press*). Diantaranya, buku-buku terbarunya yang berjudul : 1) *Prisoners of Their Premises* (*University of Chicago Press*) pada tahun 2022, yang berusaha menjelaskan bagaimana seorang pembuat kebijakan yang berbakat justru dapat membuat keputusan yang dapat membawa malapetaka; 2) *Changing Their Minds* (*University of Chicago Press*) pada tahun 2020, yang berusaha menganalisis ketidakmampuan Presiden Trump untuk mengatasi kendala yang biasa terjadi dalam kepemimpinan seorang presiden; 3) *Predicting the Presidency* (*Princeton University Press*) pada tahun 2016, yang berusaha menjelaskan bagaimana caranya untuk memahami sifat kepemimpinan seorang presiden, yang dapat memungkinkan kita untuk memprediksi keberhasilan legislatif seorang presiden dan melihat siapa saja yang cenderung mendukung keinginannya; 4) *Overreach* (*Princeton University Press*) pada tahun 2012, yang berusaha menganalisis kepemimpinan presiden selama masa kepresidenan Presiden Obama; 5) *The Strategic President* (*Princeton University Press*) pada tahun 2009, yang berusaha menawarkan formulasi baru untuk memahami kepemimpinan seorang presiden; 6) *On Deaf Ears* (*Yale University Press*) pada tahun 2006, yang berusaha mengkaji efektivitas kepemimpinan presidensial terhadap opini-

opini publik; 7) *Why the Electoral is Bad for America* (Yale University Press) pada tahun 2019 yang berusaha mengevaluasi konsekuensi dari metode pemilihan presiden; dan terakhir 8) *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press) pada tahun 1980, yang berusaha mengkaji kurangnya perhatian masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Karya George C. Edwards III yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik menjadi salah satu buku rujukan yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai.

1. 5. 1. 3. Inti dari Teori Implementasi George C. Edwards

Dalam implementasi model Edwards menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) watak atau sikap; dan 4) struktur birokrasi. Untuk menjelaskan secara lebih rinci dari keempat variabel, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 5. 1. 3. 1. Komunikasi

Pertama, komunikasi yang merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian sebuah informasi, ide dan gagasan, serta sebuah peraturan. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila mereka yang melaksanakan keputusan kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam penyampaianya juga komunikasi harus akurat dan harus dapat dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan (Arifin, 2000, hal. 5).

Komunikasi dapat dilihat sebagai sebuah tolak ukur dari seberapa jauh kebijakan dalam bentuk sebuah peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Edwards III melihat ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yaitu: 1) transmisi atau penyaluran; 2) konsistensi; dan 3) kejelasan (*clarity*).

1) Transmisi atau Penyaluran

Seperti yang diketahui bahwa persyaratan utama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Khususnya keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tetapi masih sering

terjadi ketika keputusan telah dibuat dan perintah juga telah terlaksanakan, namun dalam proses pelaksanaan keputusannya tidak berjalan secara langsung sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan keputusan itu diabaikan dan terjadi sebuah kesalahpahaman terhadap keputusan tersebut atau terjadi pemaksaan pandangan-pandangan terhadap keputusan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan atau pandangan-pandangan yang menjadi acuan.

Hal tersebut mungkin dapat terjadi disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suatu keputusan atau hambatan yang dibuat. Menurut Winarno hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut (Winarno, 2005, hal. 17):

- a. Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Tentunya pertentangan tersebut dapat menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan.
- b. Adanya hierarki birokrasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.
- c. Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif.

2) Kejelasan Komunikasi

Jika sebuah kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, tetapi juga harus diterapkan dengan jelas. Khususnya, jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana juga akan mengalami kesulitan untuk memahami apa yang mereka harus lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, ketika ada pihak yang mungkin tidak senang dengan pelaksanaan suatu kebijakan, atau dianggap akan merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam berkomunikasi juga disebabkan karena mereka yang mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

3) Konsistensi Komunikasi

Konsistensi di sini mengandung pada arti bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan konsisten dan jelas. Konsistensi di sini lebih mengarah pada sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

1. 5. 1. 3. 2. Sumber Daya

Di sini dilihat dari perintah-perintah implementasi yang mungkin diteruskan dengan cermat, jelas, dan konsisten. Tetapi apabila para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak dapat berjalan. Menurut Edwards III dalam (Agustino, 2006, hal. 158–159), oleh karena itu terdapat sumber-sumber penting meliputi :

1) Kecukupan atau Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia harus memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Khususnya dengan jumlah dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana dan keterampilan yang dimiliki tentunya akan mendorong keberhasilan pada implementasi sebuah kebijakan.

2) Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan. Khususnya dengan kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

3) Informasi

Informasi sebagai sumber penting dalam implementasi kebijakan dimana informasi harus dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

4) Sarana dan prasarana

Tentunya sebuah sarana dan prasarana dalam sumber daya akan membantu demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan.

1. 5. 1. 3. 3. Sikap

Menurut Edwards III dalam (Winarno, 2005, hal. 142–143), sikap di sini adalah sebagai sikap dari para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Khususnya, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, maka berarti adanya sebuah dukungan dari para pendukung kebijakan (masyarakat) dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

Berbeda dengan ketika para pelaksana tidak sepatutnya ketika melihat substansi suatu kebijakan yang berbeda dengan pandangan mereka, hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan yang bertentangan.

1. 5. 1. 3. 4. Struktur Birokrasi

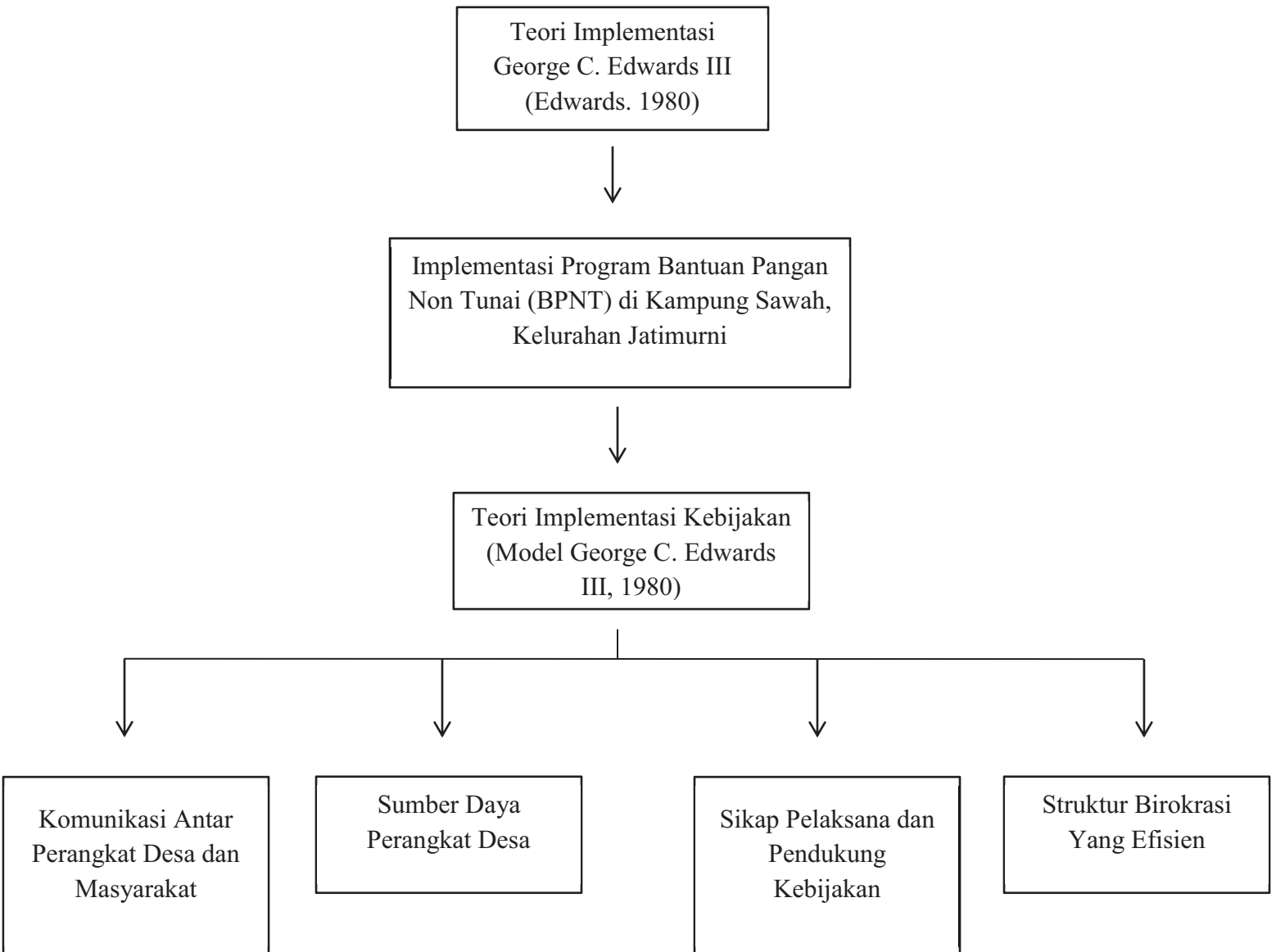
Birokrasi yang merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan, menurut Edwards III dalam (Winarno, 2005, hal. 150) terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur kerja baku standar atau *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan, maka semakin besar juga SOP menghambat implementasi. Tetapi disamping itu, SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program, memungkinkan juga akan lebih cepat menyesuaikan dengan tanggung jawab. Dapat dilihat bahwa adanya petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan.

Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit di luar organisasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing yang mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal justru penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks

membutuhkan sebuah koordinasi. Hambatan ini diperburuk lagi dengan struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, dengan semakin berkurangnya koordinasi maka semakin kecil juga kemungkinan untuk berhasil.

Dari yang telah dijelaskan di atas mengenai keempat faktor yang mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan akan digunakan dalam melihat bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni. Pertama menjelaskan bagaimana komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat dalam mendukung berjalannya implementasi program. Kedua, menjelaskan bagaimana peran sumber daya perangkat desa yang sudah memiliki kecukupan dan kualifikasi dalam pelaksanaan program BPNT, dan juga meliputi sarana dan prasarana yang mendukung penyaluran bantuan secara non tunai (*cashless*). Ketiga, menjelaskan bagaimana sikap pelaksana dan pendukung kebijakan (masyarakat) yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program. Keempat, melihat bagaimana struktur birokrasi yang efektif yang di dalamnya terdapat SOP dan fragmentasi prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program. Untuk itu peneliti membuat kerangka berpikir penelitian supaya dapat mempermudah dalam memahami inti teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980).

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian



Keterangan : Hubungan ke tingkat lebih kompleks.

Sumber: (Edward, 1980)

1. 6. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami pada makna yang terkait dengan masalah-masalah sosial.

Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti halnya mengajukan-mengajukan berbagai pertanyaan dan prosedur-prosedur yang dilakukan, mengumpulkan data yang spesifik secara partisipan, menganalisis data dan menafsirkan makna dari data yang didapat di lapangan (Creswell, 2013, hal. 94). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dalam penerapannya peneliti melakukan keterlibatan secara langsung dalam proses mengumpulkan data di lapangan. Tentunya juga disertai dengan adanya observasi secara langsung dan wawancara mendalam, serta ditunjang juga dengan studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni. Khususnya dengan melihat dari tidak hanya melihat dari sistem birokrasi (pemerintah) tetapi juga dari faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor sikap pelaksana serta pendukung kebijakan. Dari pelaksanaan program tersebut, peneliti merumuskannya ke dalam bentuk deskripsi secara narasi berdasarkan dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Peneliti menggunakan observasi secara langsung dan wawancara mendalam sebagai tahapan pengumpulan data.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan perizinan dengan pihak Kelurahan Jatimurni, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kejadian yang tidak diinginkan. Kegiatan wawancara mendalam dilakukan kepada pihak-pihak terkait, yakni dengan jumlah sebanyak 7 informan, di antaranya terdapat 4 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program BPNT, 1 petugas TKSK, 1 petugas pendamping PKH, dan 1 pengelola e-Warung.

1. 6. 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek yang telah diteliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Tunai sebagai suatu fenomena yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan sebagai produk dari budaya. Penelitian mengenai

implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai yang akan dilaksanakan di Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena terapat dua (3) alasan diantaranya yaitu: i) Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada 2 RW yaitu RW 2 dan RW 3 di wilayah Kampung Sawah. Berdasarkan tabel 2.1. total jumlah penduduk di Kelurahan Jatimurni mencapai angka 25.772 jiwa, sedangkan jika dilihat berdasarkan tabel 2.5. RW 2 dan RW 3 merupakan RW dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat terbanyak yang menerima bantuan sosial, yaitu pada RW 2 sejumlah 453 KPM dan RW 3 sejumlah 619 KPM. ii) Warga di Kampung Sawah menjadi salah satu warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah Kelurahan Jatimurni. Hal tersebut tentunya akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti. iii) Dengan adanya Keluarga Penerima Manfaat di Kampung Sawah, tentunya hal tersebut menunjukkan masih ada kemiskinan yang harus ditanggulangi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni sebagai lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai

1. 6. 2. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dapat dilakukan ketika peneliti mendapatkan Data Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Jatimurni, yang berasal dari Staff Ekbang Kelurahan Jatimurni. Meskipun telah mendapatkan Data Keluarga Penerima Manfaat, pada awalnya peneliti ingin langsung mewawancarai Keluarga Penerima Manfaat pada saat pelaksanaan program BPNT di e-Warung Melati Makmur. Tetapi ketika peneliti mendapatkan informasi kalau ternyata pelaksanaan program BPNT belum dilaksanakan kembali sejak 2 bulan terakhir, yakhirnya peneliti memutuskan untuk melakukan teknik pemilihan informan berdasarkan Data Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan secara *snowball*.

Informan menjadi salah satu kunci penting yang dibutuhkan dalam memenuhi data yang ingin dicari bagi penelitian kualitatif dan untuk itu diperlukan juga metode dalam menentukan seorang informan. Penelitian ini menggunakan sebuah teknik pemilihan informan dengan metode *snowball*, yaitu teknik penentuan informan yang awal mulanya berasal dari satu atau dua orang yang sesuai dengan fokus penelitian dan kemudian berkembang menjadi lebih banyak berasal dari informasi yang di dapatkan pada informan awal (Sugiyono, 2015, hal. 300). Informan didasarkan pada *snowball* yang mana disesuaikan dengan topik mengenai implementasi program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) dalam pemilihan informannya dilakukan dengan jumlah yang lebih kecil menjadi jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan alur wawancara yang berasal dari pihak Kelurahan Jatimurni. Pihak Kelurahan Jatimurni, khususnya Staf Ekbang yang telah memberikan gambaran umum mengenai program BPNT memberikan rekomendasi untuk lebih lanjutnya bisa melakukan wawancara dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) di wilayah Kelurahan Jatimurni karena mereka yang lebih mengerti mengenai kondisi di lapangan. Setelah dari PSM dan pendamping PKH, peneliti diarahkan ke TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Kota Bekasi dalam program BPNT. Berasal dari informasi yang dikemukakan TKSK, peneliti mengetahui terdapat 1 E-Warung di Kelurahan Jatimurni, yakni E-Warung Melati Makmur. E-Warung sebagai tempat pelaksanaan program BPNT seharusnya menjadi tempat terakhir bagi peneliti, tetapi karena informasi yang di dapat dari TKSK bahwa program BPNT belum berjalan kembali sejak 2 bulan terakhir. Peneliti mengganti rencana dengan mewawancarai berasal dari data KPM yang diberikan oleh pihak Kelurahan Jatimurni. Berikut di bawah ini adalah data dari informan yang diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 1.2. Daftar Informan

No.	Kategori	Data Informan
1.	Nama	Bapak ZK
	Usia	52 Tahun
	Sebagai	Sekretaris Kelurahan Jatimurni
2.	Nama	Ibu SM
	Usia	34 Tahun
	Sebagai	Staf Ekbang Kelurahan Jatimurni
3.	Nama	Bapak AR
	Usia	28 Tahun
	Sebagai	Pendamping PKH
4.	Nama	Ibu HF
	Usia	34 Tahun
	Sebagai	TKSK Kecamatan Pondok Melati
5.	Nama	Ibu NH
	Usia	78 Tahun
	Sebagai	Keluarga Penerima Manfaat
	Pekerjaan	Pensiun
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.000.000 (uang pensiun)
6..	Nama	Ibu EN
	Usia	61 Tahun
	Sebagai	Keluarga Penerima Manfaat
	Pekerjaan	ART (Asisten Rumah Tanggaa)
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.200.000
7.	Nama	Bapak SI
	Usia	70 Tahun
	Sebagai	Keluarga Penerima Manfaat
	Pekerjaan	Tidak Bekerja
	Jumlah Pendapatan	Rp. 0
8.	Nama	Bapak AS
	Usia	64 Tahun
	Sebagai	Keluarga Penerima Manfaat
	Pekerjaan	Penjual Beras
	Jumlah Pendapatan	Rp. 3.000.000
9.	Nama	Ibu AT
	Usia	40 Tahun
	Sebagai	Pengelola E-Warung Melati Makmur

Sumber: Data Penelitian, 2022

1. 6. 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yakni data pertama yang merupakan data di lapangan yang diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan secara langsung, kedua dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth*

interview), serta yang ketiga data yang berasal dari dokumentasi yang terdiri dari berkas laporan tahunan Kelurahan Jatimurni.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan yang dapat mengetahui dan melihat secara langsung pada kondisi dari situasi di lapangan atau lokasi penelitian ketika melihat secara langsung dari implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kampung Sawah, Kota Bekasi. Pada proses observasi atau pengamatan yang berlangsung peneliti akan memperhatikan dan mendengarkan secara langsung pada implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai.

Selain itu juga, berkaitan dengan penelitian ini yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang relevan berasal dari informan yang diwawancarai secara sistematis dan secara langsung. Serta dokumentasi berupa berkas laporan tahunan Kelurahan Jaitmurni.. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, sebagai berikut :

1. 6. 3. 1. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah proses pengamatan di mana peneliti mengamati pola perilaku dari objek yang sedang diteliti (Mardalis, 2004, hal. 62). Dengan metode observasi, peneliti akan bisa mendapatkan gambaran-gambaran peristiwa dan tingkah laku dari objek yang sedang diteliti.

Dalam penerapannya, peneliti akan berangkat ke lokasi penelitian secara langsung dan melihat kondisi *real* yang terjadi di lapangan terhadap objek yang sedang diteliti. Dalam proses observasi ini, peneliti akan mengamati secara langsung bentuk-bentuk implementasi kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat Kampung Sawah, Kota Bekasi. Dilanjutkan dengan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dan juga untuk mengetahui relevansi antara jawaban yang dikemukakan oleh informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian adalah mengamati kondisi sosial budaya di Kampung Sawah, termasuk juga pada bagaimana interaksi yang terjalin di antara warga sekitar. Pertama kali peneliti melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan Jatimurni yang berada di Jln. Rambutan No. 1, RT 005/RW 003. Untuk mengurus perizinan dan mendapatkan gambaran umum dan struktur kepengurusan di Kelurahan Jatimurni, peneliti diarahkan ke Sekretaris Kelurahan Jatimurni, yang kemudian diarahkan ke Staf Ekbang. Peneliti

dapat melihat bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan pada saat peneliti mengurus perihal perizinan.

Selain itu, peneliti juga mengamati keadaan di sekitar wilayah Kelurahan Jatimurni. Peneliti disarankan untuk menghubungi petugas PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan petugas pendamping PKH. Tetapi karena posisi petugas PSM yang sedang sibuk dan tidak bisa ditemui, akhirnya wawancara dilakukan secara *daring* dengan menggunakan *whatsapp call*. Selanjutnya peneliti mewawancarai petugas pendamping PKH dengan titik temu di depan kantor Kelurahan Jatimurni. Kemudian peneliti diarahkan untuk wawancara dengan TKSK Kecamatan Pondok Melati.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi bersamaan dengan wawancara kepada keempat (4) Keluarga Penerima Manfaat program BPNT. Meskipun penghasilan menjadi salah satu faktor penting bagi syarat kepesertaan dalam program BPNT. Kondisi wilayah dan kondisi rumah juga menjadi faktor pendukung bagi syarat kepesertaan program BPNT, untuk itu peneliti juga mengamati kondisi rumah tempat tinggal dari KPM. Seperti pada jenis lantai dan tembok tempat tinggal apakah sudah terbuat dari semen, apakah memiliki fasilitas buang air besar, apakah telah menggunakan kompor dan gas, memiliki teknologi seperti televisi, serta memiliki kendaraan pribadi atau tidak.

Untuk pelaksanaan program BPNT sendiri peneliti tidak dapat mengamati secara langsung karena memang program tersebut belum berjalan kembali sejak 2 bulan terakhir. Dengan adanya informasi tersebut yang berasal dari TKSK, peneliti memutuskan untuk langsung melakukan observasi ke e-Warung sebagai tempat pelaksanaan program BPNT. Dari observasi yang dilakukan, e-Warung Melati Makmur memiliki lokasi yang strategis dan halaman yang cukup luas untuk mendukung berjalannya program BPNT.

1. 6. 3. 2. Wawancara

Metode wawancara menurut Mashud dalam (Suyanto & Sutinah, 2005, hal. 69) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi, yang dalam hal ini dapat berupa hasil atau data yang berupa percakapan dari seorang informan dengan cara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung atau dengan menemui informan secara langsung.

Wawancara mendalam dilakukan kepada 7 orang dengan memberikan pertanyaan kepada informan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun. Sehingga data yang di dapat dapat dijadikan rujukan untuk memaksimalkan hasil penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengacu kepada pedoman wawancara (Lampiran 1) yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti agar wawancara lebih terfokus sehingga jawaban dari informan tidak keluar ke dalam bingkai penelitian. Peneliti menggunakan *handphone* untuk merekam hasil dari wawancara dengan informan, yang kemudian dilakukan transkrip wawancara yang mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

Informan pertama yang ditemui oleh peneliti adalah Bapak Amri selaku Pendamping PKH Kelurahan Jatimurni. Wawancara dilakukan dengan Bapak AR yang bertempat di depan Kantor Kelurahan Jatimurni. Peneliti tidak mendapatkan hambatan yang berarti pada prosesnya, informan memiliki ketersediaan dan kecukupan waktu dalam proses wawancara. Karena sebelumnya peneliti telah membuat janji dengan informan melalui pesan *whatsapp*. Informan kedua yang ditemui oleh peneliti adalah Ibu HF selaku TSK Kecamatan Pondok Melati. Wawancara dilakukan dengan Ibu HF melalui *daring*. Disini peneliti mendapatkan hambatan, terutama karena proses komunikasi yang dilakukan secara *daring* menggunakan *whatsapp call* karena kondisi kesehatan Ibu HF yang kurang baik pada saat itu. Tetapi meskipun mendapatkan hambatan karena sulitnya untuk berkomunikasi secara *daring*, peneliti tetap mendapatkan data yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya, informan ketiga yang ditemui oleh peneliti adalah Bapak SI selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT. Wawancara dilakukan dengan Bapak SI yang bertempat di rumah Bapak SI. Meskipun bertemu tanpa adanya janji terlebih dahulu, peneliti tidak mendapatkan hambatan yang berarti pada prosesnya, informan memiliki ketersediaan dan kecukupan waktu dalam proses wawancara. Bapak SI merupakan seorang yang sudah tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Bapak SI memiliki keterbukaan, sehingga mempermudah peneliti pada proses wawancara. Informan keempat yang ditemui oleh peneliti adalah Bapak AS selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT. Wawancara dilakukan dengan Bapak AS yang bertempat di rumah Bapak AS. Meskipun bertemu tanpa adanya janji terlebih dahulu, peneliti tidak mendapatkan hambatan yang berarti pada prosesnya, informan memiliki

ketersediaan dan kecukupan waktu dalam proses wawancara. Bapak AS merupakan seorang yang bekerja sebagai penjual beras dengan pendapatan Rp. 3.000.000 untuk setiap bulannya. Bapak AS sedikit tertutup ketika dihadapkan pada pertanyaan mengenai pendapatan perbulan. Ternyata juga seiring berjalannya wawancara, Bapak AS mengemukakan bahwa dirinya termasuk keluarga yang mampu yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut.

Informan kelima yang ditemui oleh peneliti adalah Ibu EN selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT. Wawancara dilakukan dengan Ibu EN yang bertempat di rumah Ibu EN. Dengan bertemu tanpa adanya janji terlebih dahulu, peneliti sedikit kesulitan untuk bertemu dengan Ibu EN. Tetapi setelah peneliti menjelaskan maksud dan tujuannya datang, serta memberitahu identitas peneliti sebagai mahasiswa, Ibu EN bersedia untuk diwawancarai. Ibu EN merupakan seorang yang bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dengan pendapatan Rp. 1.200.000 untuk setiap bulannya. Informan keenam yang ditemui oleh peneliti adalah Ibu NH selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT. Wawancara dilakukan dengan Ibu NH bertempat di rumah Ibu NH. Meskipun bertemu tanpa adanya janji terlebih dahulu, peneliti tidak mendapatkan hambatan yang berarti pada prosesnya, informan memiliki ketersediaan dan kecukupan waktu dalam proses wawancara. Ibu NH merupakan seorang yang sudah pensiun dengan uang pensiun sejumlah Rp. 2.000.000 untuk setiap bulannya. Peneliti sedikit mengalami kesulitan pada saat berkomunikasi, dikarenakan Ibu NH yang sudah menyentuh usia 78 tahun. Tetapi dengan perlahan, peneliti tetap dapat mendapatkan informasi yang mendukung data penelitian. Informan ketujuh yang ditemui oleh peneliti adalah Ibu AT selaku pengelola E-Warung Melati Makmur. Wawancara dilakukan di rumah Ibu AT yang berdekatan dengan E-Warung Melati Makmur. Peneliti tidak mendapatkan hambatan yang berarti pada prosesnya, informan memiliki ketersediaan dan kecukupan waktu dalam proses wawancara. Karena sebelumnya peneliti telah membuat janji dengan informan melalui pesan *whatsapp*.

1.6.3.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015, hal. 456) merupakan sebuah data sekunder yang mana secara tidak langsung dapat mendukung penelitian yang dilakukan dengan bentuk arsip atau dokumen. Khususnya di dalam

penelitian, arsip atau dokumen yang digunakan berasal dari Data Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Jatimurni. Tentunya, Data Penerima Manfaat tersebut telah memudahkan peneliti untuk mengetahui siapa saja warga yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Jatimurni.

1. 7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana pada analisis data kualitatif ini yang berkaitan dengan suatu tipe penelitian yang termasuk dalam etnografi. Hal tersebut dikarenakan, pada analisis data kualitatif sendiri merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan dari suatu fenomena yang dapat menjadi permasalahan yang dalam hal ini terjadi di dalam masyarakat.

Selanjutnya, setelah data terkumpul peneliti akan melakukan proses pemilahan sumber data yang diperoleh dari lokasi penelitian, khususnya data yang di dapat ketika melakukan proses penelitian berupa data primer dan data sekunder di sini data primer yang di diperoleh dari hasil penelitian peneliti selama melakukan penelitian dalam bentuk catatan lapangan transkrip wawancara, foto-foto dari dokumentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan data primer yang diperoleh berasal dari file atau dokumen mengenai implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi. Setelah itu maka dapat dianalisis dan dideskripsikan dalam laporan penelitian dengan menggunakan teori implementasi model George C. Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press) pada tahun 1980, mengenai proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai yang terjadi.

Diketahui bahwa sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk menguraikan bagaimana proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai yang mana dalam teori implementasi model George C. Edwards III dalam buku *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press) pada tahun 1980 melihat pada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) watak atau sikap; dan 4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkesinambungan dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian dan tipe penelitian seperti ini maka peneliti dapat menganalisis suatu data atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian.